

INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 2018



INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 2018

Nomor Publikasi : 19055.1916

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xi + 80 halaman

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan

Penyunting :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan

Gambar Kulit :

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan
bekerjasama dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan

“ Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik “

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA SELATAN

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator untuk menganalisis perkembangan suatu daerah.

Publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan. Dalam publikasi Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 ini memuat indikator-indikator untuk mengukur pembangunan daerah Kabupaten Bangka Selatan demi kemajuan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan ke depannya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan dan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Toboali, Desember 2019

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka Selatan,

Sumadi, S.Pd.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA SELATAN

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat serta hidayah-Nya telah tersusun buku "Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018" oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.

Indikator pembangunan daerah sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Pada publikasi ini, terdapat beberapa macam indikator pembangunan daerah dimulai dari indikator sosial budaya seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, juga indikator lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan manusia di daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah, digunakan juga Indeks Gini, ketimpangan dengan kriteria Bank Dunia dan Indeks Williamson.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi pihak yang membutuhkan terutama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Toboali, Desember 2019
Kepala BPS Kabupaten Bangka Selatan,

I Ketut Mertayasa, SST.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3 Sistematika Penyajian.....	4
II RUANG LINGKUP DAN METODE	5
2.1 Sumber Data.....	5
2.2 Konsep dan Definisi.....	5
2.2.1 Rumah Tangga.....	5
2.2.2 Anggota Rumah Tangga.....	7
2.2.3 Pengertian Ketimpangan.....	8
2.3 Indeks Gini.....	10
2.4 Ketimpangan Kriteria Bank Dunia.....	11
2.5 Indeks Williamson.....	13
2.6 Indeks Pembangunan Manusia.....	15
2.6.1 Pengertian Pembangunan Manusia.....	15
2.6.2 Sumber Data dalam Menghitung IPM.....	16
2.6.3 Konsep dan Definisi dalam IPM.....	16
2.6.4 Metodologi dalam Menghitung IPM.....	17
2.6.5 Tahapan Menghitung IPM.....	18
2.6.6 Manfaat IPM.....	20

III	CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA SELATAN	22
3.1	Keadaan Geografis.....	22
3.2	Pemerintahan dan Wilayah Administrasi.....	23
3.3	Sosial dan Kependudukan	24
3.3.1	Kependudukan.....	24
3.3.2	Pendidikan	29
3.3.3	Kesehatan	34
3.3.4	Ketenagakerjaan.....	37
3.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	38
3.4.1	Posisi Kabupaten Bangka Selatan di Tingkat Propinsi	40
3.4.2	Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka Selatan	42
3.4.3	Perkembangan Komponen Penyusun IPM	43
3.5	Kemiskinan dan Ketimpangan	47
3.5.1	Perkembangan Garis Kemiskinan	47
3.5.2	Perkembangan Jumlah dan Persentase Kemiskinan	48
3.5.3	Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	50
3.5.4	Ketimpangan Pendapatan Kriteria Bank Dunia dan Perkembangan Indeks Gini.....	52
3.5.5	Perkembangan Indeks Williamson	55
IV	PENUTUP	57
	LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

2.1	Nilai Minimum dan Maksimum untuk Penghitungan Indeks Indikator IPM.....	19
3.1	Jumlah Kelurahan/Desa, Dusun, Lingkungan dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan, 2018	24
3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2018.....	25
3.3	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk , Rasio Jenis Kelamin, 2015-2018.....	28
3.4	Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2016 – 2018	34
3.5	Jumlah Penduduk Usia Kerja, 2018	37

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kurva Lorenz.....	10
3.1	Peta Kabupaten Bangka Selatan.....	22
3.2	Komposisi Luas Wilayah Menurut Kecamatan, 2018.....	23
3.3	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2018.....	26
3.4	Piramida penduduk, 2018.....	28
3.5	Perkembangan Angka Melek perkembangan Huruf Usia 15 Tahun Keatas Kab. Bangka Selatan dan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2009-2018.....	30
3.6	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah, 2014 - 2018.....	31
3.7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2014-2018.....	32
3.8	Perkembangan Angka Kesakitan (Morbiditas) Kabupaten Bangka Selatan dan Prov. Kep. Bangka Belitung, 2014-2018.....	35
3.9	Persentase Penolong Proses Kelahiran dengan Tenaga Medis, 2014-2018.....	36
3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018.....	39
3.11	IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018.....	40
3.12	Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018.....	41
3.13	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2018.....	42
3.14	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, 2012-2018.....	43
3.15	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH), 2011-2018.....	44
3.16	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS), 2011-2018.....	45
3.17	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 2011-2018.....	46
3.18	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah), 2011-2018.....	47
3.19	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan dan Prov. Kep. Babel, 2009-2018.....	48
3.20	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (HC) (dalam ribuan jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (HCI), 2009-2018.....	49
3.21	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018.....	50

3.22	Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2009-2018.....	51
3.23	Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia, 2016-2018.....	53
3.24	Ketimpangan Pendapatan menurut Indeks Gini, 2016-2018.....	54
3.25	Perkembangan Indeks Williamson, 2014-2018.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	60
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018	61
3.	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018	62
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	63
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	64
6.	Angka Melek Huruf 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	65
7.	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	66
8.	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	67
9.	Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	68
10.	Angka Kesakitan (Morbiditas) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018	69
11.	Persentase Penolong Proses Kelahiran dengan Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018	70
12.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	71
13.	Angka Harapan Hidup (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018	72
14.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	73
15.	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	74
16.	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribuan Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018 ..	75

17.	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	76
18.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018	77
19.	Garis Kemiskinan (dalam Rupiah per Kapita) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018 ..	78
20.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	79
21.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018.....	80

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan, dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah terdiri dari pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan 2016-2020 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berisikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi tersebut disusun beserta tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi yang akan dilaksanakan dan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Ada berbagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pertumbuhannya yang diukur berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan regional di bidang ekonomi yang umum digunakan. Akan tetapi, tingginya nilai PDRB tidak menjamin tingginya kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan berdasarkan konsep, nilai PDRB yang tinggi di suatu wilayah tidak selalu dinikmati oleh masyarakat setempat meskipun dihasilkan oleh wilayah tersebut.

Dengan adanya kelemahan PDRB, UNDP mencoba mengajukan ukuran lain, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kinerja pembangunan wilayah dengan melihat tiga aspek utama yang diharapkan mampu memotret *outcome* dari kegiatan pembangunan di berbagai aspek baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga aspek yang dicakup dalam IPM adalah pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran RPJMD tersebut, dibutuhkan indikator-indikator yang dapat mengkaji kemajuan atau progres pembangunan daerah. Salah satu alternatif untuk mengukur kinerja pembangunan suatu negara atau daerah adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). Indeks ini secara umum mengukur kinerja pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dalam proses pembangunan sering terjadi ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan alokasi sumber daya baik sumberdaya manusia, fisik, teknologi maupun kapital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda di dalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan.

Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat kesenjangan atau ketimpangan pembangunan ekonomi adalah adanya kemiskinan diberbagai sektor. Berbagai program dan strategi mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia, pembukaan lapangan kerja, eksplorasi sumberdaya alam dan penyediaan program padat karya.

Diperlukan suatu ukuran/ indikator tertentu untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi di masyarakat sehingga pemerintah dapat merancang program untuk mengurangi/mengatasi ketimpangan tersebut.

Penghitungan Indeks Gini, pemerataan pendapatan versi *World Bank* (Bank Dunia) dan indeks ketimpangan Williamson adalah beberapa indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Oleh sebab itulah disusunlah Publikasi Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang memuat indikator-indikator tersebut yang dapat menjadi salah satu ukuran perkembangan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dalam dokumen RPJMD 2016-2020.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilaksanakannya penyusunan Buku Indeks Pembangunan Daerah (IPD) adalah untuk menyediakan data Statistik yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan Kabupaten Bangka Selatan berupa Indeks Pembangunan Manusia, kondisi pemerataan atau ketimpangan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan melalui Indeks Gini, pemerataan pendapatan Versi Bank Dunia dan Indeks Ketimpangan Williamson.

Manfaat penyusunan Buku Indeks Pembangunan Daerah ini adalah :

1. Sebagai sarana evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai indikator-indikator pembangunan dalam RPJMD 2016-2020.
2. Sebagai acuan bagi pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.
3. Alat ukur dalam menetapkan prioritas agenda program pembangunan daerah ke depan baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dalam mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian materi yang disusun dalam buku ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut.

- ✓ Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang dari penulisan buku ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajiannya.
- ✓ Bab II Metode, yang berisi sumber data yang digunakan, konsep definisi, dan penjelasan singkat mengenai penghitungan indikator ketimpangan kemakmuran, pemerataan pendapatan, ketimpangan regional, dan pembangunan manusia.
- ✓ Bab III Capaian Pembangunan Daerah, yang merupakan bagian utama yang mengulas indikator-indikator pembangunan daerah.
- ✓ Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penghitungan indikator-indikator pembangunan daerah.

2

RUANG LINGKUP DAN METODE

2.1 Sumber Data

Buku Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan ini memuat data yang diperoleh dari BPS baik hasil sensus maupun survei, utamanya data yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan nama SUSENAS. Selain itu, data lainnya diperoleh dari publikasi-publikasi BPS yang datanya bersumber dari instansi terkait lainnya.

Data-data yang dikumpulkan BPS merupakan data pengolahan hasil sensus dan survei maupun data yang dikutip dari berbagai publikasi BPS. Demikian halnya dengan data yang diperoleh dari instansi terkait lainnya juga dikutip dari berbagai publikasi, baik elektronik maupun cetak.

2.2 Konsep dan Definisi

2.2.1 Rumah Tangga

Konsep rumah tangga dalam Susenas dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Pelaksanaan pencacahan rumah tangga Susenas hanya mencakup rumah tangga biasa.

a. Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa di antaranya:

1. Orang yang tinggal bersama istri dan anaknya;

2. Orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri;
3. keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu blok sensus;
4. rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang;
5. pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama istri, anak, serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
6. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri.

b. Rumah Tangga Khusus mencakup:

1. Orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, dan lain sebagainya.
2. Orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan, dan sejenisnya.
3. Sekelompok orang yang mondok dengan makan yang berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

2.2.2 Anggota Rumah Tangga/ART

Konsep ART dalam Susenas adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara sedang tidak ada (kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, orangtua/mertua, family lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya). Seseorang yang tinggal kurang dari 6 bulan dan tidak berniat menetap, tetapi telah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih, maka orang tersebut dicatat dimana dia tinggal pada saat pencacahan, ia tidak dicatat lagi dirumah asalnya.

Termasuk anggota rumah tangga, sebagai berikut:

1. Bayi yang baru lahir;
2. Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih;
3. Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap (pindah datang)
4. Pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikannya;
5. Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang;
6. Kepala rumah tangga yang bekerja di tempat lain (luar BS) tidak pulang setiap hari tapi pulang secara periodic (kurang dari 6 bulan) seperti pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang.

Tidak termasuk anggota rumah tangga:

1. Anak yang tinggal di tempat lain (di luar BS) misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orangtuanya seminggu sekali atau ketika

libur, dianggap telah membentuk ruta sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari.

2. Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah.
3. Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk pindah
4. Pembantu ruta yang tidak tinggal di ruta majikan
5. Orang yang mondok tidak dengan makan
6. Orang yang mondok dengan makan (indekos) lebih dari 10 orang.

2.2.3 Pengertian Ketimpangan

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan ditanyakan selama sebulan atau setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan kedalam pengeluaran rata-rata sebulan. Kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi aspek "keadilan dan pemerataan" selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*)

Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.

2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*)

Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).

3. Simetris

Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.

4. Sensivitas Transfer *Pigou-Dalton*

Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan.

Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain.

2. Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikan perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang kepercayaan) umumnya dapat dibentuk.

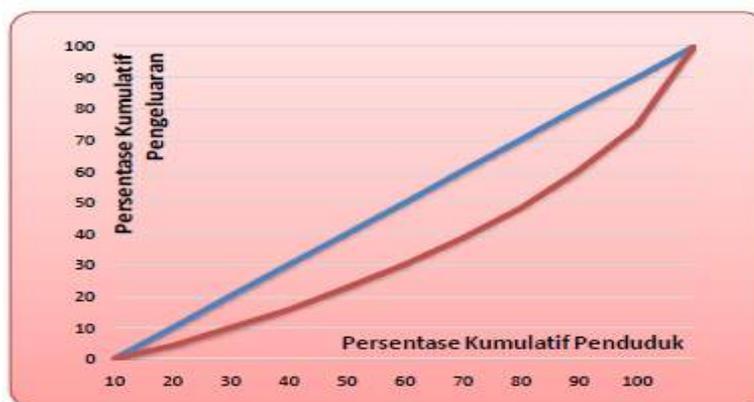
2.3 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan kemakmuran secara menyeluruh. Indeks Gini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Untuk membentuk Indeks Gini, gambarlah grafik persentase kumulatif rumah tangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva *Lorenz* seperti yang ditunjukkan pada gambar II.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna.

Indeks Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ maka Indeks Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ maka Indeks Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Jadi nilai Indeks Gini yang semakin kecil (mendekati nol) berarti ketimpangan pendapatannya semakin kecil (pendapatan penduduk semakin merata). Gambar berikut ini menunjukkan contoh Kurva *Lorenz* yang terbentuk sesuai dengan nilai Indeks Gininya.

Gambar 2.1 Kurva Lorenz



Formula yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum [F_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})]$$

Dimana;

GR : Indeks Gini

F_{pi} : Frekuensi penduduk dikelas pengeluaran ke-i

F_{ci} : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran dikelas pengeluaran ke-i

F_{ci-1} : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran di kelas pengeluaran ke-(i-1)

Indeks Gini yang diperoleh dihitung berdasarkan data pengeluaran dari hasil Susenas. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran angka "0" dan "1". Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-indikator Makro ekonomi, LPEM- FEUI, 1995):

- GR<0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0,4≤GR≤0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat)
- GR>0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

2.4 Ketimpangan Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam 3 kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan dengan dasar pengelompokkan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan

20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Adapun formula yang digunakan adalah:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times Q_i$$

Dimana;

YD_4 : Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan ke $i-1$

P_i : Persentase kumulatif penduduk ke- i

Q_i : Persentase pendapatan ke- i

Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan versi Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total seluruh pendapatan penduduk kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki **ketimpangan pendapatan tinggi**;
- Jika proporsi jumlah pendapatan yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki **ketimpangan pendapatan sedang/ menengah**;

- Jika proporsi jumlah pendapatan yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan **pendapatan rendah**;

2.5 Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya yang juga penting untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/daerah (kecamatan) dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB perkapita tingkat kabupaten maupun per kecamatan dalam kaitannya dengan jumlah penduduk kabupaten dan per kecamatan. Penghitungan Indeks Williamson dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^8 (y_i - Y)^2 \times n_i / N}}{Y}$$

Dimana;

IW : Indeks Williamson

y_i : PDRB perkapita di Kecamatan *i*

Y : PDRB perkapita rata-rata seluruh Kecamatan di Kab. Bangka Selatan

n_i: Jumlah penduduk di Kecamatan *i*

N : Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Selatan

i : Sesuai jumlah Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan (8 Kecamatan)

Ini berarti bahwa pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung

berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

- Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata.
- Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional termasuk di daerah. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, dan perkembangan teknologi merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Kemudian, untuk menjaga konsistensi penghitungan, maka perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan PDRB Provinsi yang selanjutnya diikuti dengan PDRB Kabupaten/Kota.

Selain itu, Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990), sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Adanya berbagai perubahan pada penghitungan PDRB ini tentunya menyebabkan perubahan nilai Indeks Wiliamson yang sudah pernah dihitung sebelumnya dengan menggunakan PDRB metode lama.

2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.6.1 Pengertian Pembangunan Manusia

Konsep Pembangunan manusia adalah sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).
3. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
4. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
5. Secara berkala, data IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).

6. IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia. Indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki Pemerintah Daerah.

2.6.2 Sumber Data dalam Menghitung IPM

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia terutama adalah Susenas. Selain itu, digunakan juga data hasil Sensus Penduduk (SP2000 dan SP2010) serta Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 dan SUPAS 2015. Susenas Kor digunakan untuk menghitung angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Hidup (e0) dihitung menggunakan modeling berdasarkan data SP2000, SP2010, SUPAS 2005 dan SUPAS 2015. Sementara Susenas Modul Konsumsi digunakan untuk menghitung daya beli.

2.6.3 Konsep dan Definisi dalam IPM

1. Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (e0)

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

2. Angka Harapan Lama Sekolah/HLS (*Expected Years of Schooling*)

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

3. Rata-rata Lama Sekolah/RLS (*Mean Years of Schooling-MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level propinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

2.6.4 Metodologi dalam Menghitung IPM

Tahun 2015 lalu BPS melakukan perubahan Metodologi penghitungan IPM, antara lain:

1. Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPAK (metode Trussel dengan model West), dengan input Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup.
2. Angka Harapan Lama Sekolah, menghitung peluang penduduk berumur 7 tahun ke atas akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

3. Rata-rata Lama Sekolah, menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menjalani sekolah.
4. Paritas Daya Beli dihitung dengan proses sebagai berikut:
 - Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level Kabupaten/Kota.
 - Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.
 - Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.
 - Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

2.6.5 Tahapan Penghitungan IPM

Untuk menghitung IPM, maka setiap komponen dihitung indeksinya.

Formula penghitungan indeks sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i, j) = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}$$

$X(i,j)$ = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X(i-\min)$ = Nilai minimum dari X_i (Standar UNDP)

$X(i-\max)$ = Nilai maksimum dari X_i (Standar UNDP)

Dengan menggunakan formula di atas, Indeks Kesehatan (Harapan Hidup), Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran (Daya Beli) dapat dihitung. Nilai minimum dan maksimum merupakan angka standar UNDP.

➤ Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup - AHH) :

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{(AHH - AHH_{\min})}{(AHH_{\max} - AHH_{\min})}$$

➤ Indeks Pendidikan terdiri dari dua komponen:

- Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS);

$$\text{Indeks HLS} = \frac{(HLS - HLS_{\min})}{(HLS_{\max} - HLS_{\min})}$$

- Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS);

$$\text{Indeks RLS} = \frac{(RLS - RLS_{\min})}{(RLS_{\max} - RLS_{\min})}$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{(I_{HLS} + I_{RLS})}{2}$$

➤ Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Batasan nilai minimum dan maksimum yang digunakan untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dibawah.

Tabel 2.1 Nilai Minimum dan Maksimum untuk Penghitungan Indeks Indikator IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dihitung sebagai rata-rata Geometrik dari Indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni:

1. IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai IPM < 60
2. IPM kelompok “sedang” dengan kriteria $60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$
3. IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria $70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$
4. IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria Nilai IPM ≥ 80

Selain dilihat dari nilai absolutnya, tingkat kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu dapat diketahui menggunakan pendekatan pertumbuhan IPM. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah mencapai nilai maksimalnya dan semakin rendah pertumbuhan maka semakin lambat mencapai nilai maksimal. Secara umum, pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh pada periode t dengan capaian pada periode sebelumnya (t-1). Formula penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPMt : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM(t-1) : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.6.6 Manfaat IPM

Penggunaan IPM untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial dan ekonomi secara sistematis telah mendapat pengakuan secara luas. *Statistical Institute for Asia and the Pacific* (SIAP) merekomendasikan semua negara yang menjadi anggotanya untuk menghitung IPM yang sesuai untuk perbandingan antar wilayah dalam negara yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia dengan menghitung

nilai IPM secara berkala. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dalam penghitungan komponen penyusun IPM sebagai akibat dari perbedaan konsep dan definisi statistik antarnegara maupun kualitas dan ketersediaan data yang dimilikinya. Secara umum, penyusunan IPM memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

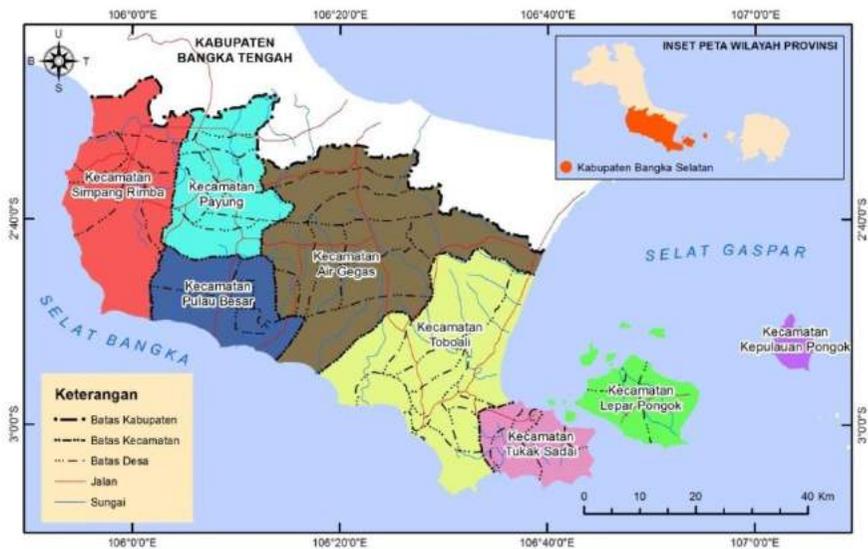
3

CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

3.1 Keadaan Geografis

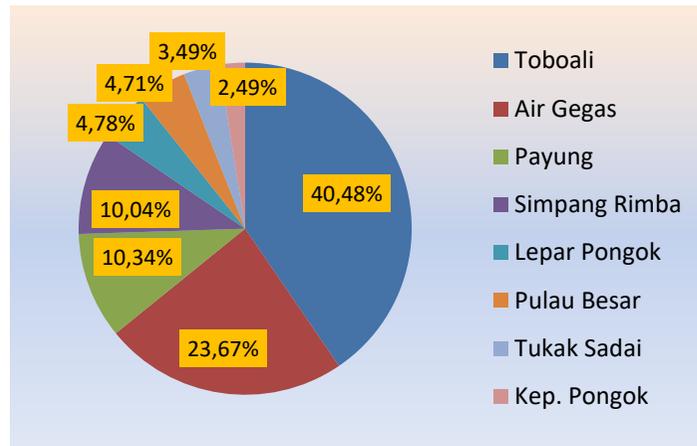
Kabupaten Bangka Selatan terletak pada 2'-3' lintang selatan dan 105'-107' bujur timur. Kabupaten Bangka Selatan secara administratif merupakan kabupaten dengan wilayah terbesar di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah daratan Kabupaten Bangka Selatan lebih kurang 3.607,08 km² atau 360.708 Ha.

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bangka Selatan



Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah. Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar.

Gambar 3.2 Komposisi Luas Wilayah Menurut Kecamatan, 2018



Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Selatan dalam Angka, 2019

Menurut komposisi luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, kecamatan paling luas adalah Kecamatan Toboali yang mencapai 40,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan Kecamatan Kepulauan Pongok merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 2,49 persen dari luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Dilihat dari iklimnya, Kabupaten Bangka Selatan beriklim tropis dengan jumlah hari hujan 210 HH dan rata-rata kecepatan angin 4,8 knots. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Pangkalpinang, suhu udara rata-rata daerah Kabupaten Bangka Selatan bervariasi antara 23,0 hingga 32,4 derajat celsius dengan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 76 hingga 86 persen.

3.2 Pemerintahan dan Wilayah Administrasi

Penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah berfungsi sebagai eksekutif yang dipimpin oleh bupati dan dibantu oleh seorang wakil bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan/Desa, Dusun, Lingkungan dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Payung		9	33		126
Pulau Besar		5	19		69
Simpang Rimba		7	26		118
Toboali	3	8	39	20	312
Tukak Sadai		5	15		55
Air Gegas		10	46		172
Lepar Pongok		4	12		41
Kep. Pongok		2	12		18
Jumlah	3	50	202	20	911

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Selatan dalam Angka, 2019

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan secara administratif terbagi menjadi delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Payung, Simpang Rimba, Pulau Besar, Air Gegas, Toboali, Tukak Sadai, Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok. Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan berada di Kecamatan Toboali.

3.3 Sosial dan Kependudukan

Pembahasan analisis sosial merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007, yaitu suatu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan analisis sosial meliputi beberapa bidang pendukungnya, yaitu bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pendapatan, kesejahteraan dan lainnya.

3.3.1 Kependudukan

Analisis kependudukan adalah analisis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi, kondisi serta komposisi penduduk yang digunakan sebagai

acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk dan untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi objektif dari berbagai perencanaan pengembangan/ pemberdayaan masyarakat.

Gambaran potensi kependudukan dari sisi kuantitas dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: komposisi penduduk, rasio ketergantungan, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan persebaran penduduk, serta rasio jenis kelamin. Potensi penduduk dari sisi kualitas dapat dilihat melalui indikator-indikator kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, sosial lainnya.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2018

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	10.742	10.267	21.009
5-9	10.590	10.036	20.626
10-14	10.182	9.757	19.939
15-19	9.901	9.278	19.179
20-24	10.394	9.788	20.182
25-29	9.698	9.347	19.045
30-34	9.179	8.609	17.788
35-39	8.848	8.011	16.859
40-44	7.906	6.798	14.704
45-49	6.291	5.235	11.526
50-54	4.660	3.702	8.362
55-59	2.966	2.770	5.736
60-64	2.508	2.099	4.607
65-69	1.430	1.299	2.729
70-74	900	925	1.825
75+	796	989	1.785
Total	106.991	98.910	205.901

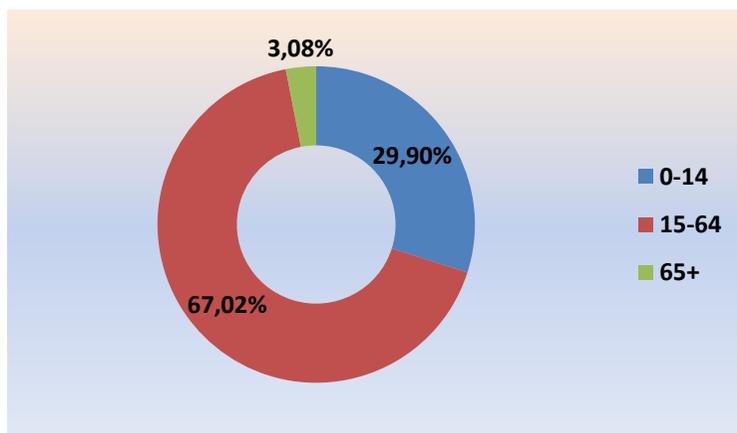
Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2025

Sumber utama data kependudukan berasal dari sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Hasil dari sensus penduduk dilakukan proyeksi, sehingga didapat data proyeksi penduduk untuk tahun-tahun yang tidak

dilaksanakan sensus. Penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 berdasarkan hasil proyeksi penduduk yaitu sebanyak 205.901 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 106.991 jiwa (51,96 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 98.910 jiwa (48,04 persen).

Komposisi penduduk merupakan salah satu karakteristik pokok kependudukan. Komposisi penduduk ini mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi. Dampak keberhasilan pembangunan bidang kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk yang tercermin dengan semakin rendahnya angka beban ketergantungan.

Gambar 3.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2018



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk, 2010-2025

Penduduk di suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori berdasarkan komposisi umurnya, yaitu penduduk tidak produktif (penduduk yang berumur 0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) dan penduduk produktif (penduduk yang berumur 15 – 64 tahun). Komposisi penduduk Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.3, bahwa pada tahun 2018 proporsi penduduk pada kelompok umur 15 – 64 tahun sebesar 67,02 persen, sedangkan proporsi

penduduk pada kelompok 65 tahun keatas sebesar 3,08 persen. Sementara itu proporsi penduduk pada kelompok umur 0 – 14 tahun sebesar 29,90 persen.

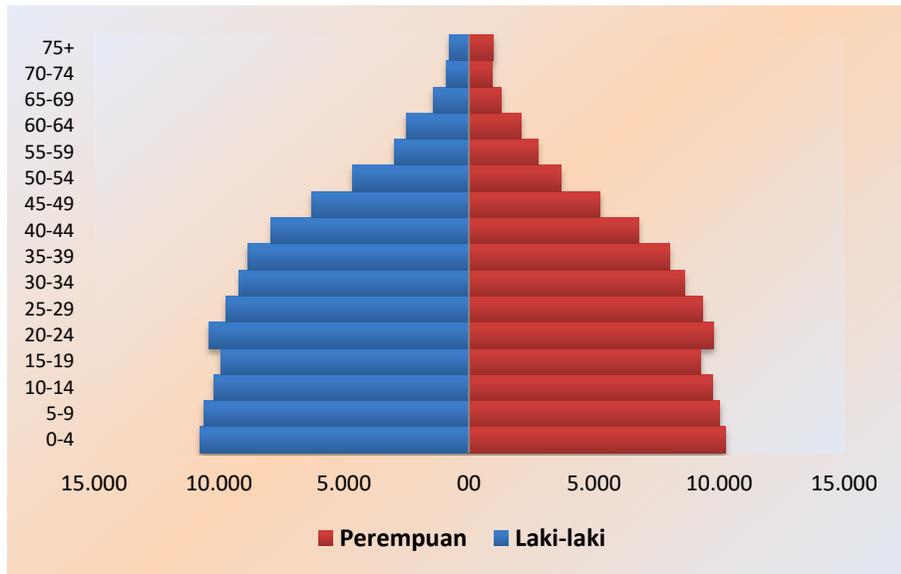
Untuk mengkaji komposisi umur penduduk biasanya dilakukan perhitungan angka beban ketergantungan. Angka tersebut menginformasikan kepada kita berapa orang yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif dan biasanya angka ini dihitung dengan satuan 100 jiwa penduduk usia produktif. Angka beban ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 adalah sebesar 47,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk usia produktif harus menanggung penduduk yang tidak produktif hampir 48 jiwa. Berdasarkan hasil tersebut, Kabupaten Bangka Selatan telah masuk pada periode bonus demografi, sedangkan secara nasional bonus demografi di estimasi pada tahun 2025-2030.

Bonus demografi dapat didefinisikan sebagai kondisi menguntungkan bagi pembangunan suatu wilayah, karena besarnya jumlah penduduk usia produktif yang menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Keadaan ini sering disebut sebagai *the window of opportunity* yang harus dimanfaatkan dengan baik, karena secara teori hanya akan terjadi sekali.

Komposisi penduduk secara lebih detil dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 20-24 tahun (Gambar 3.4).

Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 sebesar 108,17. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan ada sebanyak 108 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bangka Selatan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Gambar 3.4 Piramida penduduk, 2018



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2025

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk , Rasio Jenis Kelamin, 2015-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	193.583	2,16	108,01
2016	197.670	2,11	108,04
2017	201.782	2,08	108,19
2018	205.901	2,04	108,17

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Selatan selama 4 tahun terakhir cenderung stabil. Hal ini dapat dilihat melalui laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, dimana laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Selatan tumbuh sekitar dua persen setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 sekitar 2,04 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,08 persen.

3.3.2 Pendidikan

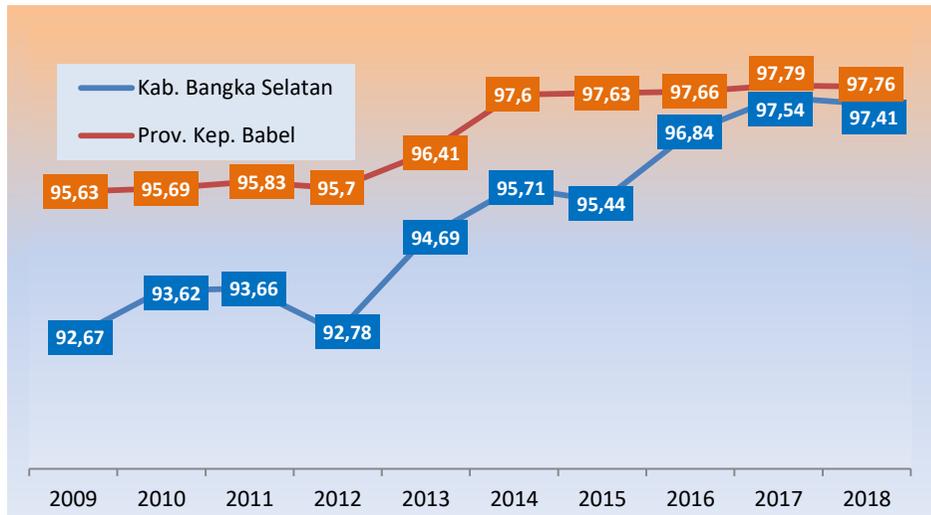
Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal. Kesempatan memperoleh pendidikan menjadi hak dasar setiap warga negara dan semua warga negara diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan dasar. Sementara, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan dasar yang murah, terjangkau, bermutu, dan merata sekaligus mengalokasikan anggaran untuk biayanya.

Perkembangan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator bidang pendidikan seperti ketersediaan sarana dan infrastruktur pendidikan, angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, maupun angka melek huruf yang semakin meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

Di era globalisasi yang sudah maju seperti ini, kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis menjadi suatu keharusan. Hal ini dikarenakan informasi dan ilmu pengetahuan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Program-program pemerintah untuk memerangi buta huruf juga terus dilakukan.

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca serta menulis kalimat sederhana. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk. Dengan kata lain indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan.

Gambar 3.5 Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Keatas Kab. Bangka Selatan dan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2009-2018



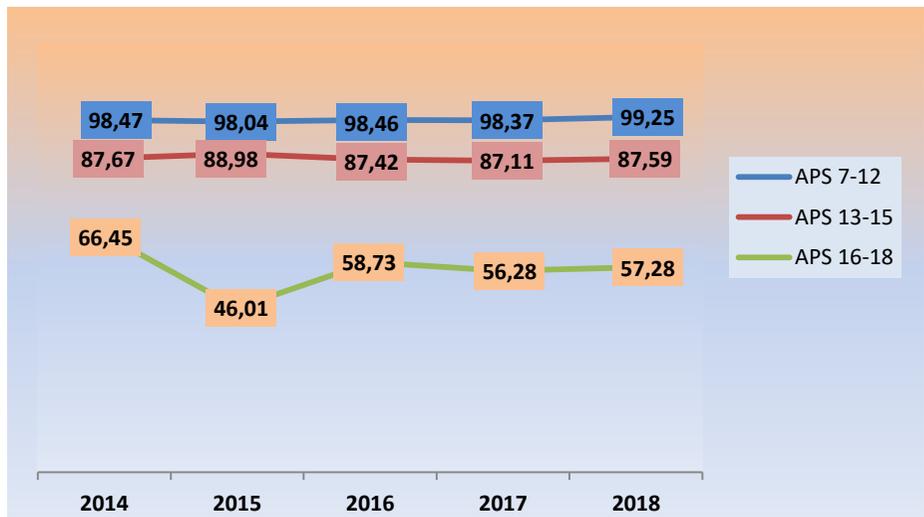
Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Terdapat pola yang meningkat pada perkembangan Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Bangka Selatan selama periode 2009-2018. Pada tahun 2009, AMH tercatat sebesar 92,67 persen meningkat secara bertahap menjadi 97,41 persen di tahun 2018. Secara eksplisit, angka tersebut menggambarkan masih terdapat 2,59 persen penduduk yang berstatus buta huruf atau tidak/belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dibandingkan dengan AMH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, AMH Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 tercatat lebih rendah 0,35 persen dari angka provinsi.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya untuk mengejar ketertinggalan masyarakat di bidang pendidikan yang dilakukan dengan upaya pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun serta meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Selain itu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS merupakan perbandingan anak usia tertentu yang masih sekolah pada tingkat apapun dengan jumlah anak usia yang bersangkutan.

Gambar 3.6 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah, 2014 - 2018



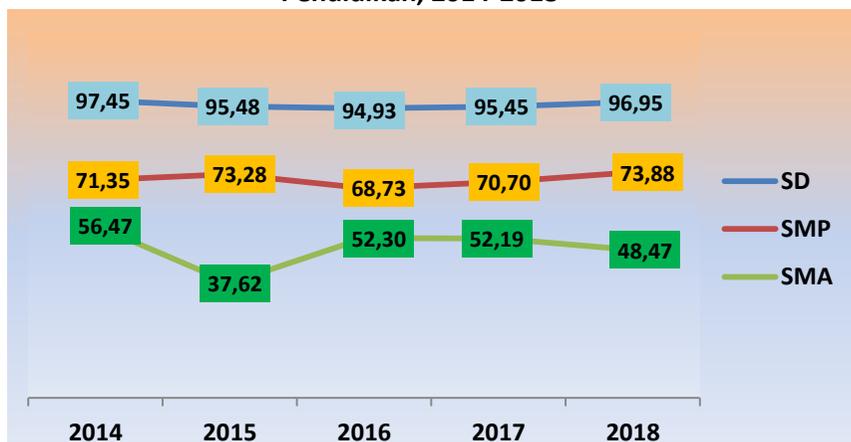
Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Gambar 3.6 memperlihatkan perkembangan APS Kabupaten Bangka Selatan selama lima tahun terakhir. APS penduduk berusia 7 – 12 tahun (usia SD) terlihat meningkat mendekati 100 persen, yaitu 99,25 persen pada tahun 2018. Artinya 99,25 persen penduduk usia 7 – 12 tahun memiliki status sedang bersekolah pada berbagai jenjang. Sedangkan sisanya, 0,75 persen berstatus tidak/belum pernah sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Demikian halnya dengan penduduk usia 13 – 15 tahun (usia SMP), perkembangan APS mengalami fluktuatif dan mencapai 87,59 persen pada tahun 2018.

Untuk APS penduduk berusia 16 – 18 tahun (usia SMA), terlihat perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 66,45 persen menjadi 57,28 persen pada tahun 2018. APS penduduk berusia 16 – 18 tahun masih jauh di bawah APS penduduk berusia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hampir separuh penduduk berusia 16 – 18 tahun berstatus tidak/belum pernah sekolah atau sudah tidak sekolah lagi (putus sekolah). Berbagai permasalahan seperti kesulitan biaya pendidikan, akses ke sekolah sulit, membantu ekonomi keluarga, atau tidak mampu mengikuti menjadi alasan utama mereka yang tidak bersekolah.

Partisipasi sekolah penduduk juga bisa dikaji berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM). APM dihitung dari jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang sekolah yang sesuai dengan usianya dibagi dengan jumlah penduduk pada usia yang sama. Indikator ini berguna untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang tepat waktu atau sesuai dengan standar usia pada jenjang pendidikan yang berkaitan.

Gambar 3.7 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2014-2018



Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Secara umum level APM terlihat semakin menurun

seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APM jenjang SD pada tahun 2018 tercatat 96,95 persen, artinya jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD sederajat mencapai 96,95 persen. Keberhasilan implementasi program Wajib Belajar Sembilan tahun terlihat dari tingginya angka partisipasi pada jenjang ini. Sisanya 3,05 persen berstatus belum/tidak pernah sekolah di tingkat SD karena terlambat masuk sekolah dan sudah bersekolah pada tingkat SMP karena masuk sekolah sebelum waktunya atau mengikuti program akselerasi.

APM tingkat SMP di tahun 2018 tercatat sebesar 73,88 persen, artinya proporsi penduduk usia 13 – 15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP sederajat sebanyak 73,88 persen. Sisanya, sebanyak 24,49 persen masih bersekolah pada jenjang SD karena kasus terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas dan sudah bersekolah pada jenjang SMA, serta sudah tidak bersekolah lagi.

APM pada tingkat SMA tercatat mencapai 48,47 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka nilai APM semakin rendah. Hal ini dikarenakan tidak semua lulusan mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akibat persoalan biaya, kasus tinggal kelas, tidak lulus, kesulitan mengakses sekolah dan alasan lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar yang berkualitas. Untuk itu berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Semakin banyak pendidik atau guru yang berkualitas maka dipastikan anak didik semakin baik kualitasnya. Namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah banyaknya guru harus sesuai dengan jumlah murid didik dan terdistribusi seimbang di seluruh wilayah.

Tabel 3.4 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2016 - 2018

Uraian		2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Rasio Murid-Guru	SD Sederajat	18	20	21
	SMP Sederajat	16	15	17
	SMA Sederajat	13	15	15
Rasio Murid-Sekolah	SD Sederajat	255	260	260
	SMP Sederajat	250	256	258
	SMA Sederajat	341	342	362

Sumber : BPS, diolah dari Kabupaten Bangka Selatan dalam Angka, 2019

Rasio murid guru di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 untuk jenjang SD sederajat adalah sebesar 21, artinya seorang guru SD memiliki tanggung jawab mendidik kurang lebih 21 anak dan untuk jenjang SMP sederajat rasio murid guru sebesar 17 anak, serta untuk jenjang SMA sederajat rasio murid-guru sebesar 15 anak. Rasio murid-sekolah pada jenjang SD sebesar 260, artinya kemampuan sekolah pada tahun 2018 dapat menampung sebanyak 260 anak. Untuk jenjang SMP sebesar 258 anak, dan jenjang SMA sederajat sebesar 362 anak.

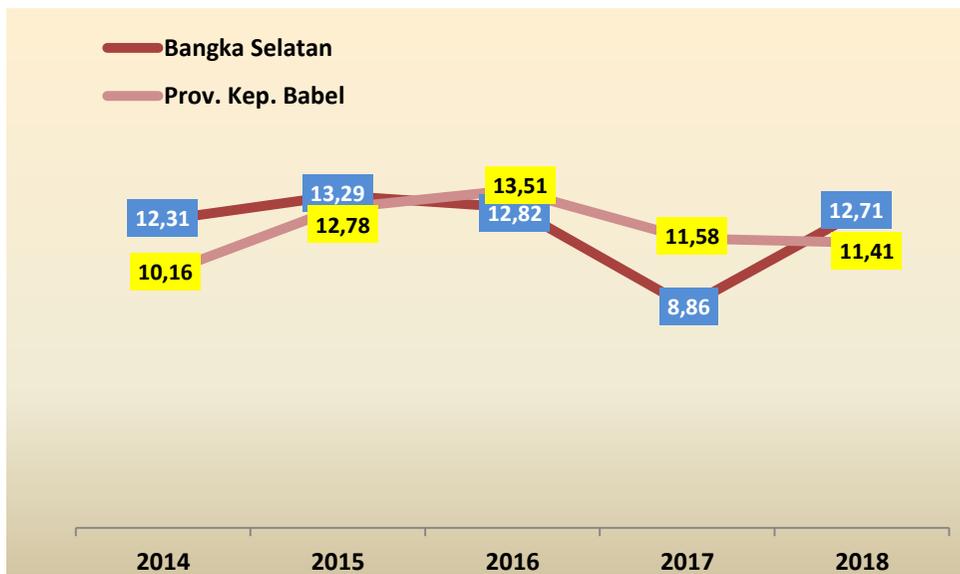
3.3.3 Kesehatan

Faktor kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha peningkatan derajat kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas penduduk, yang harus terus dikelola agar sumber daya manusia mampu bersaing dengan sesama saudaranya di seluruh tanah air, bahkan mungkin bisa ikut bersaing di dunia internasional.

Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat oleh pemerintah adalah dengan melakukan program baik yang sifatnya promotif, preventif, maupun kuratif. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperolehnya secara merata dan murah. Dengan upaya tersebut diharapkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

Status kesehatan memberikan suatu gambaran mengenai kondisi kesehatan pada waktu tertentu antara lain dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan (morbiditas) dan rata-rata lama sakit. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, misalnya pekerja tidak mengalami gangguan kesehatan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja lebih lama dan optimal.

Gambar 3.8 Perkembangan Angka Kesakitan (Morbiditas) Kabupaten Bangka Selatan dan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2014-2018



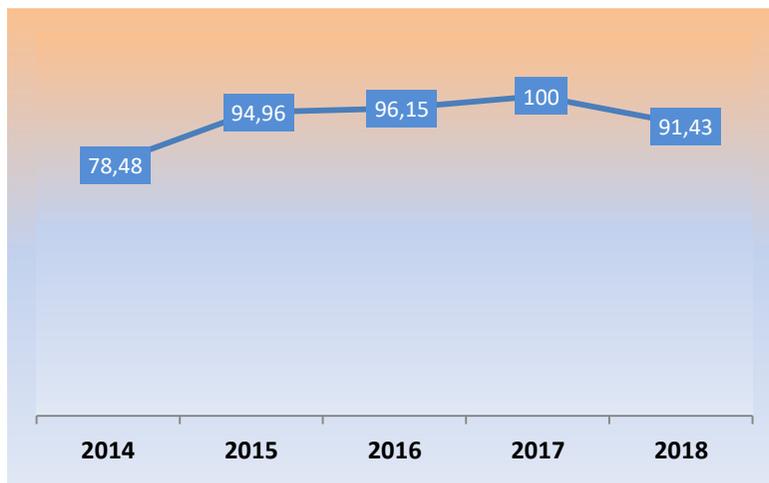
Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari terhadap jumlah seluruh penduduk. Angka kesakitan ini dapat digunakan

sebagai bahan intervensi program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat/bangsa yang sehat. Pada tahun 2018, angka kesakitan di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 12,71 persen, artinya 12,71 persen penduduk Kabupaten Bangka Selatan yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitasnya terganggu.

Salah satu cara untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan anak. Penolong persalinan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu ketika proses bersalin adalah tenaga kesehatan terlatih seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Gambar 3.9 Persentase Penolong Proses Kelahiran dengan Tenaga Medis, 2014-2018



Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Berdasarkan Gambar 3.9 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persentase penolong kelahiran dari 78,48 persen pada tahun 2014 menjadi 100 persen pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 91,43 persen. Pada tahun 2017, nampak bahwa masyarakat Bangka Selatan sudah

mempercayakan proses kelahiran kepada tenaga medis. Namun sayangnya kondisi ini sedikit menurun pada tahun 2018.

3.3.4 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Semakin baik kualitas tenaga kerja yang dimiliki suatu wilayah, maka produktivitas pekerjaannya juga semakin meningkat. Konsep ketenagakerjaan di Indonesia merujuk pada rekomendasi dari *International Labor Organization* (ILO). ILO membagi penduduk berusia produktif (15 tahun keatas) berdasarkan aktivitasnya menjadi kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup semua penduduk berusia kerja yang berstatus bekerja dan pengangguran. Sementara, bukan angkatan kerja mencakup mereka yang aktivitasnya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Usia Kerja, 2018

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Angkatan Kerja	99.839
Bekerja	95.494
Pengangguran	4.345
Bukan Angkatan Kerja	48.299
Sekolah	12.489
Mengurus Rumah Tangga	31.162
Lainnya	4.648
Penduduk Usia Kerja	148.138

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas, 2018

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan kesempatan kerja berjalan lebih lambat. Akibatnya, tidak semua angkatan kerja dapat terserap oleh pasar tenaga kerja dan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga

kerja. Ketidakseimbangan ini memunculkan persoalan pengangguran dan persoalan ketenagakerjaan lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 di Kabupaten Bangka Selatan tercatat sekitar 148.138 penduduk usia kerja, dan 67,40 persennya merupakan angkatan kerja. Ini berarti, dari 100 penduduk 15 tahun ke atas (usia kerja), 68 orang bersedia bekerja atau terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Selebihnya, tidak berminat bekerja dikarenakan masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau karena alasan lainnya.

Meskipun antusias masyarakat untuk bekerja masih cukup tinggi, pasar tenaga kerja saat ini masih belum bisa menampung pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada tahun 2018, terdapat 4.345 orang yang tidak memperoleh pekerjaan (pengangguran). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 sebesar 4,35 persen, kedua tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kota Pangkalpinang. Angka tersebut 0,7 poin diatas rata-rata angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

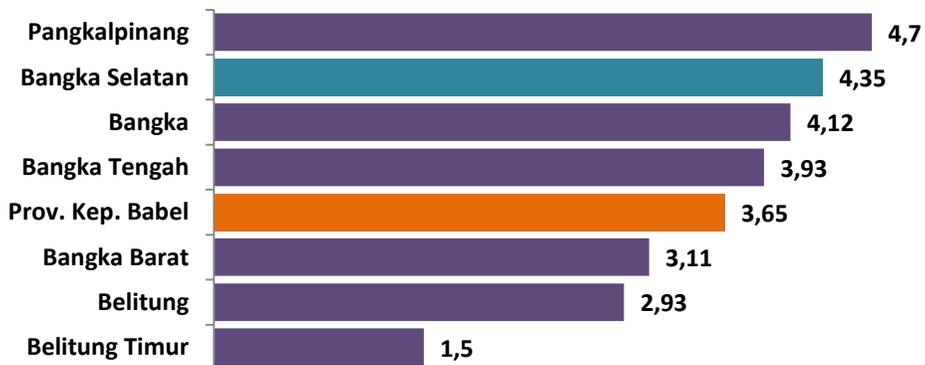
Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, TPT Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan, yaitu dari 2,74 persen meningkat menjadi 4,35 persen pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan kondisi pertambangan timah yang kurang stabil di wilayah Bangka Selatan. Selain itu kondisi pertanian dimana harga-harga produksi pertanian yang menurun dapat menjadi penyebab meningkatnya pengangguran di wilayah Bangka Selatan.

3.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Manusia selaku subjek sekaligus objek pembangunan tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan pendapatan semata, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan manusianya. Pembangunan manusia ini menjadi hal yang sangat penting karena manusia adalah sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu cara untuk melihat dan mengukur proses pembangunan manusia itu terjadi dari waktu ke waktu maupun antara suatu daerah dengan daerah yang lain.

Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018



Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Penghitungan IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi/komponen penyusun, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat dilihat melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Dimensi pengetahuan dapat dilihat melalui indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS). Dimensi kehidupan layak dilihat melalui indikator Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*).

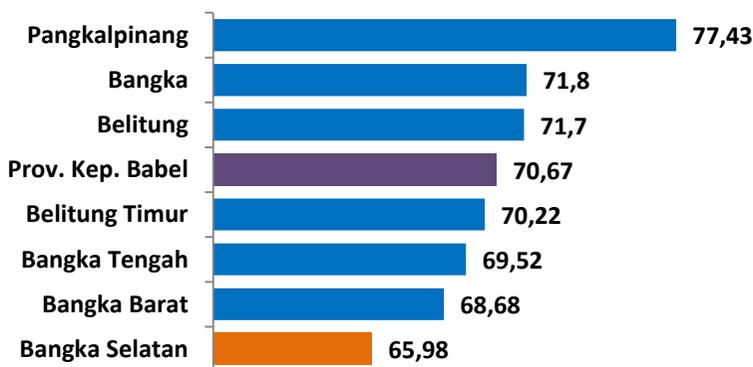
3.4.1 Posisi Kabupaten Bangka Selatan di Tingkat Provinsi

Sejak pertama kali digunakan IPM metode baru, yakni tahun 2010 hingga tahun ini BPS secara rutin melakukan penghitungan IPM level nasional, provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Bangka Selatan mencapai 65,98 mengalami peningkatan sebesar 0,96 poin dibanding dengan tahun sebelumnya. Dengan tingkat IPM tersebut Kabupaten Bangka Selatan tergolong kategori “sedang” dalam hal pembangunan manusia.

Di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Bangka Selatan berada pada posisi terendah dari 7 kabupaten/ kota di tahun 2018. Dilihat menurut kabupaten/kota, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang yakni sebesar 77,43. Sementara kabupaten dengan capaian IPM terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 4 kabupaten yang mencapai IPM kategori “tinggi”. Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan bersama 2 kabupaten/kota lain termasuk kategori “sedang”.

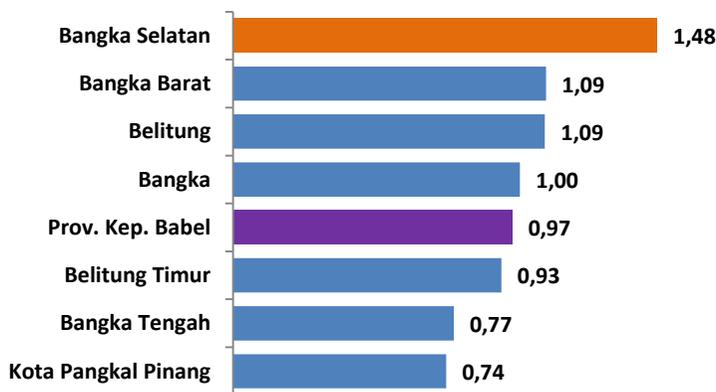
Gambar 3.11 IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018



Sumber : BPS , IPM 2018

Level capaian IPM memang penting untuk melihat kemajuan pembangunan suatu wilayah. Namun, level saja tidak cukup untuk mencatat kemajuan pembangunan manusia. Kecepatan pembangunan manusia dapat dilengkapi sudut pandang capaian pembangunan manusia. Kecepatan lebih menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai suatu level tertentu dalam pembangunan manusia.

Gambar 3.12 Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018



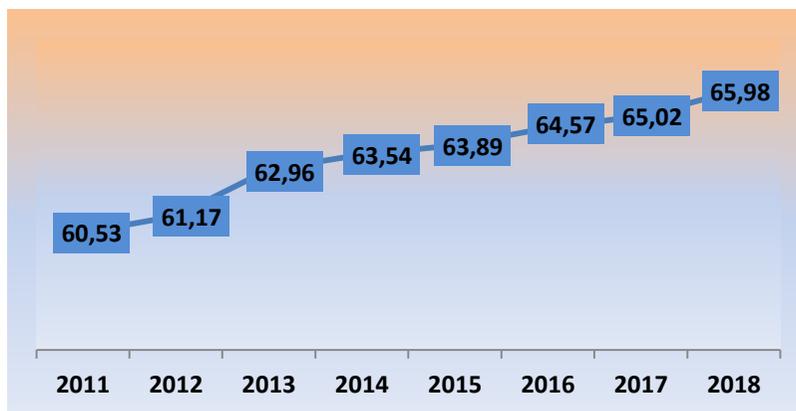
Sumber : BPS, IPM 2018

Kecepatan pembangunan manusia diukur dengan pertumbuhan IPM. Dilihat dari kecepatan pembangunan, Kabupaten Bangka Selatan menempati peringkat satu teratas diantara 7 kabupaten/kota, dengan pertumbuhan IPM tahun 2018 sebesar 1,48 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh indikator rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang tumbuh masing-masing sebesar 3,92 persen dan 5,22 persen. Sementara indikator harapan lama sekolah dan umur harapan hidup saat lahir di tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 0,08 persen dan 0,51 persen. Pertumbuhan IPM Kabupaten yang cukup tinggi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerahnya.

3.4.2 Pembangunan Manusia di Kab. Bangka Selatan

Pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2011 (lihat Gambar 3.12). Dari tahun 2011 hingga 2018, IPM Kabupaten Bangka Selatan telah meningkat 5,45 poin yang menunjukkan adanya peningkatan pada kualitas manusia di Kabupaten Bangka Selatan dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonominya.

Gambar 3.13 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2018



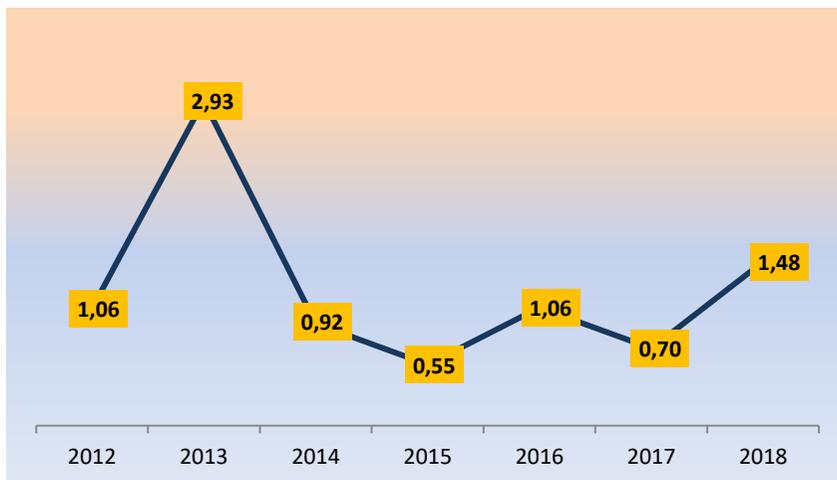
Sumber : BPS , IPM 2011-2018

Percepatan pembangunan manusia yang diukur dengan pertumbuhan IPM juga bisa menjadi indikasi yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Dalam rangka mencapai nilai ideal IPM yaitu 100, tentunya dibutuhkan pertumbuhan IPM yang tinggi. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM ideal akan tercapai.

Gambar 3.13 memperlihatkan pertumbuhan IPM Kabupaten Bangka Selatan sejak tahun 2012 hingga 2018. Selama periode tersebut pertumbuhan IPM Kabupaten Bangka Selatan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, IPM

Kabupaten Bangka Selatan tumbuh 1,06 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dimana IPM Kabupaten Bangka Selatan tumbuh 2,93 persen. Pada Tahun 2018 IPM Kabupaten Bangka Selatan berhasil naik sebesar 1,48 persen. Secara umum, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bangka tiap tahun dari 2012 hingga 2018 adalah sebesar 1,24 persen.

Gambar 3. 14 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, 2012-2018



Sumber : diolah dari BPS, IPM 2011-2018

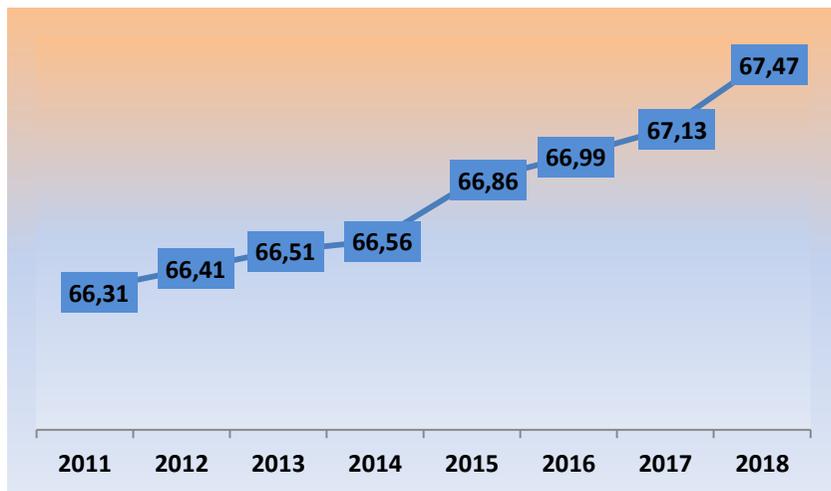
3.4.3 Perkembangan Komponen Penyusun IPM

Tiga komponen utama IPM dalam pengukuran capaian pembangunan manusia sesuai rekomendasi UNDP adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat (Angka Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). Angka Harapan Hidup menggambarkan aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator AHH, maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Indikator umur harapan hidup penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada saat lahir (E_0) tercatat meningkat dari 66,31 tahun pada tahun 2011 menjadi 67,47 tahun pada tahun 2018. Angka sebesar 67,47 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seseorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 hingga akhir hayatnya.

Gambar 3.15 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH), 2011-2018



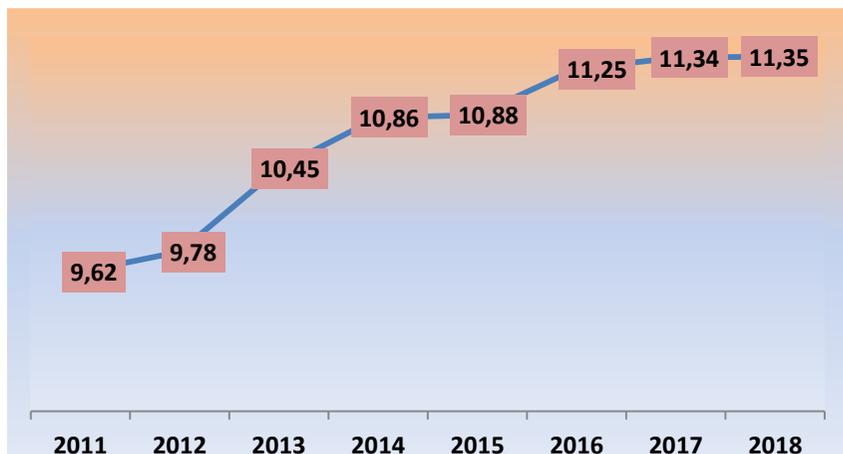
Sumber : BPS, IPM 2011-2018

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 menempati urutan terakhir dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Umur harapan hidup masyarakat Kabupaten Bangka Selatan lebih rendah 2,71 poin dari umur harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas.

Indikator harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bangka Selatan tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2011-2018. Pada tahun 2018, angka harapan lama sekolah mencapai 11,35 tahun, meningkat jauh dibanding tahun 2011 yang sebesar 9,62 tahun. Angka 11,35 tahun ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Gambar 3.16 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS), 2011-2018



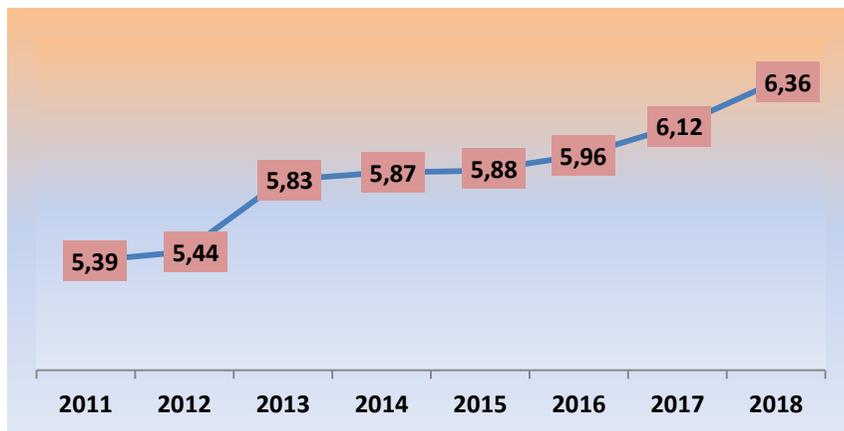
Sumber : BPS, IPM 2011-2018

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 5,39 tahun di tahun 2011 menjadi 6,36 tahun di tahun 2018. Angka sebesar 6,36 tahun ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bangka Selatan. Angka ini setara dengan kelas 6 SD.

Perkembangan kedua indikator pendidikan diatas merepresentasikan stok modal manusia (*human capital*) di Kabupaten Bangka Selatan yang semakin meningkat. Meskipun terjadi peningkatan, namun angka tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berhasil diterapkan di Kabupaten Bangka Selatan, mengingat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangka Selatan baru mencapai kelas 6 SD.

Pendidikan merupakan sebuah investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka yang pendek. Output kegiatan pendidikan berupa peningkatan kualitas modal manusia akan dirasakan pada masa mendatang. Pencapaian kedua indikator pendidikan baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah menggambarkan tolok ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada masa sekarang dan masa lampau.

Gambar 3.17 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 2011-2018

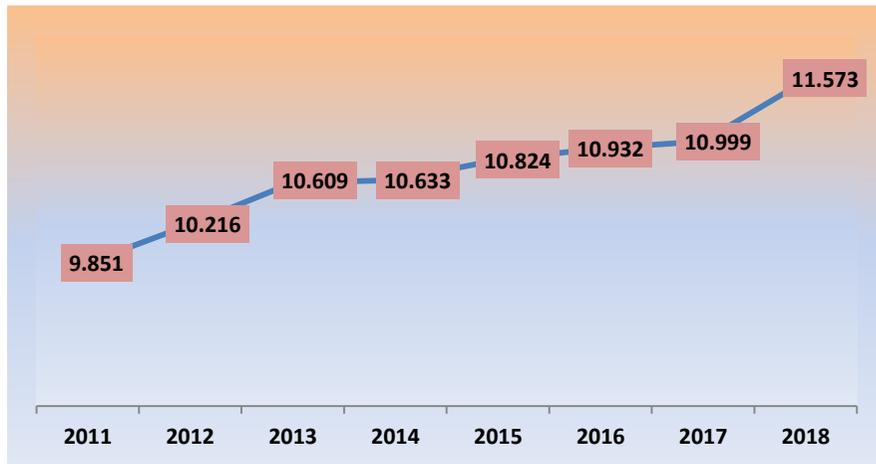


Sumber : BPS, IPM, 2011-2018

Standar hidup yang layak sebagai salah satu komponen penyusun IPM diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita riil per bulan yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Indikator ini dihitung menggunakan data konsumsi rumah tangga hasil Susenas.

Perkembangan nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bangka Selatan selama periode 2011-2018 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Nilainya mencapai Rp9,85 juta setahun pada tahun 2011 dan secara bertahap meningkat menjadi Rp11,57 juta pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan daya beli dan kualitas kesejahteraan penduduk Kabupaten Bangka Selatan secara rata-rata yang semakin membaik.

Gambar 3.18 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah), 2011-2018



Sumber : BPS, IPM 2011-2018

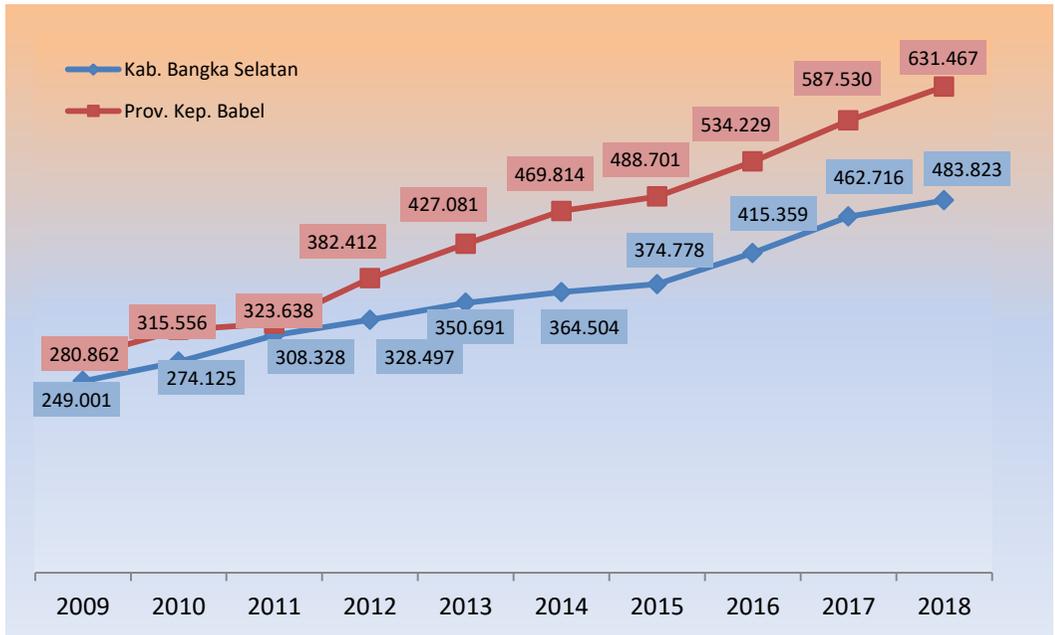
3.5. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak semata-mata dipresentasikan oleh tingginya pendapatan per kapita penduduk maupun pertumbuhannya. Tetapi, kesejahteraan juga menyangkut aspek peningkatan kapasitas atau kemampuan yang berfungsi sekaligus memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dengan sasaran akhir penurunan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan yang dihasilkan oleh proses pertumbuhan.

3.5.1. Perkembangan Garis Kemiskinan

Perkembangan nilai nominal garis kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 10 tahun menunjukkan pola semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga (inflasi). Pada tahun 2009, garis kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sebesar Rp.249.001,- per kapita sebulan. Secara bertahap, angka ini meningkat hingga Rp.483.823,- per kapita sebulan di tahun 2018.

Gambar 3.19 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan dan Prov. Kep. Babel, 2009-2018



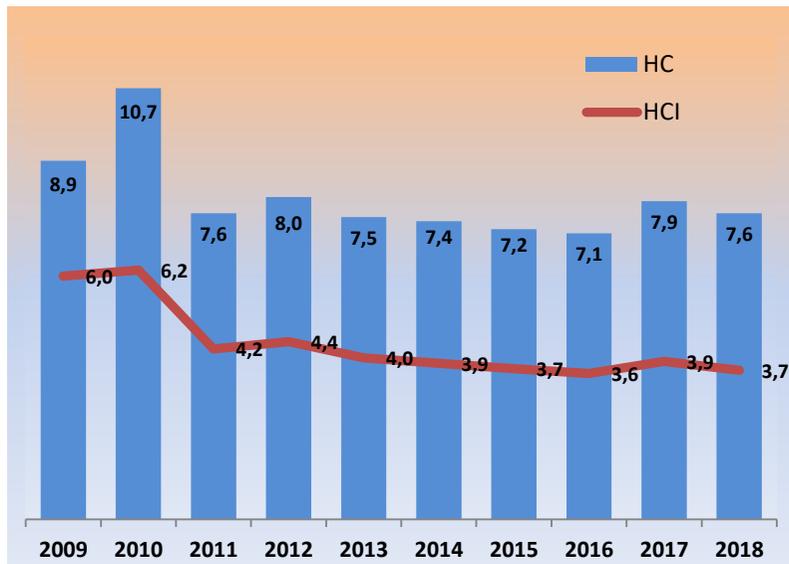
Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan tercatat selalu lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan pada level provinsi. Hal ini menjadi salah satu sebab level kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan cenderung lebih rendah dibandingkan angka Provinsi, karena ukuran kemiskinan sangat sensitif terhadap besarnya nilai garis kemiskinan yang digunakan.

3.5.2. Perkembangan Jumlah dan Persentase Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang lazim digunakan adalah jumlah penduduk miskin/HC (jiwa) dan persentase penduduk miskin/HCI (%). Perkembangan jumlah penduduk miskin (*Head Count*-HC) Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 10 tahun (2009-2018) yang terlihat pada Gambar 3.18 menunjukkan kecenderungan semakin menurun, meskipun polanya terlihat sedikit berfluktuasi.

Gambar 3.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (HC) (dalam ribuan jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (HCI), 2009-2018

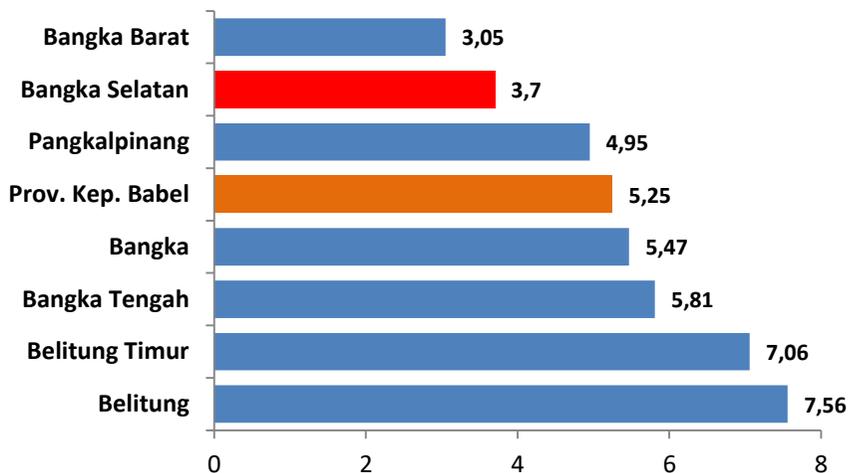


Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebanyak 8,9 ribu jiwa dengan persentase (*Head Count Index*-HCI) 6,0 persen pada tahun 2009. Secara bertahap, jumlah penduduk miskin maupun persentasenya menurun hingga mencapai 7,6 ribu jiwa atau 3,7 persen pada tahun 2018. Berdasarkan series data, jumlah penduduk miskin terlihat beberapa kali mengalami peningkatan seperti pada tahun 2010, 2012 dan 2017. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada waktu-waktu tersebut terjadi akibat pengaruh kenaikan harga yang cukup tinggi.

Kenaikan harga-harga komoditas pangan dan energi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang lainnya melalui kenaikan bahan bakar produksi dan transportasi. Di sisi permintaan, kenaikan harga-harga akan menurunkan daya beli yang selalu dialami kelompok penduduk yang berpendapatan terendah. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin.

Gambar 3.21 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018



Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

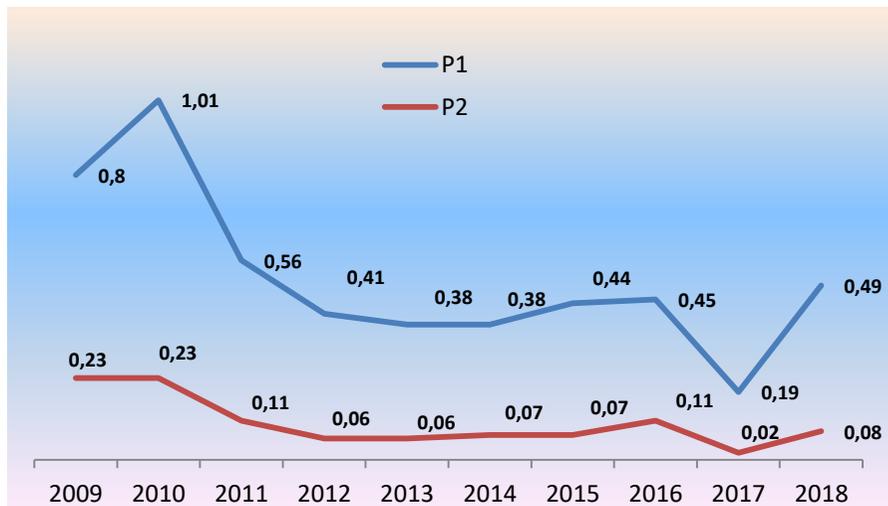
Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan dibawah angka provinsi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan merupakan peringkat kedua dari 7 kabupaten/kota setelah Kabupaten Bangka Barat.

3.5.3. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak sekedar mencakup urusan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga menyangkut aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan. Secara sederhana, indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2) menggambarkan derajat ketimpangan pendapatan yang terjadi diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Berdasarkan *series data* selama periode 2009–2018, terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan. Penurunan ini menjadi sinyal positif bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan. Namun demikian, nilai kedua indeks tercatat meningkat beberapa kali pada tahun 2010, 2015, 2016 dan 2018. Penyebab kenaikan kedua indeks adalah pertumbuhan pengeluaran kelompok penduduk miskin.

Gambar 3.22 Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), 2009-2018



Sumber : BPS, Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Nilai indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 masing-masing tercatat 0,49 dan 0,08. Nilai indeks kedalaman kemiskinan ini meningkat dibandingkan tahun 2017, yang artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Sementara itu, nilai indeks keparahan kemiskinan sedikit naik, yang artinya ketimpangan/kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin merata.

3.5.4. Ketimpangan Pendapatan Kriteria Bank Dunia dan Perkembangan Indeks Gini

Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata melalui peningkatan pendapatan per kapita. Namun, kebijakan tersebut juga membawa persoalan berupa peningkatan ketidamerataan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena kepemilikan asset dan keterampilan (*skill*) antar penduduk tidak tersebar secara merata, sehingga level pendapatan yang diterima juga sangat bervariasi. Ada banyak indikator yang dapat menggambarkan derajat ketimpangan pendapatan antar individu atau penduduk (distribusi ukuran). Indikator yang sering digunakan adalah ukuran Bank Dunia dan Indeks Gini.

Penghitungan ketimpangan pendapatan dengan kriteria Bank Dunia ini berpatokan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Menurut Kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikelompokkan menjadi 3 katagori, yaitu:

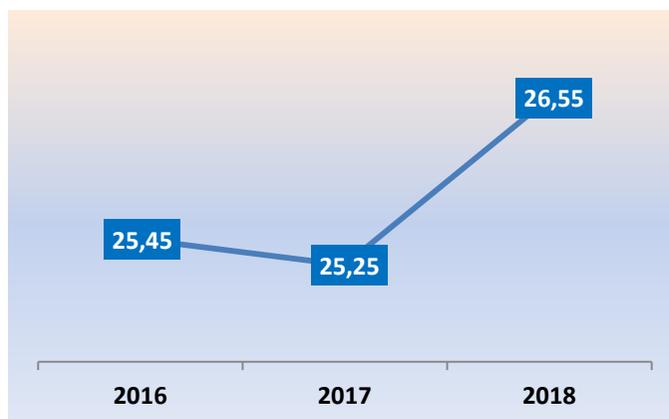
- Ketimpangan pembagian pendapatan disebut serius/parah jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan.
- Ketimpangan pembagian pendapatan disebut menengah jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan.
- Ketimpangan pembagian pendapatan disebut rendah jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen pendapatan.

Salah satu kelemahan dari penghitungan ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia ini adalah bahwa ukuran ini bukan merupakan suatu ukuran distribusi pendapatan yang bersifat menyeluruh, karena penentuan

kriteria ketimpangan hanya memperhatikan perkembangan pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah saja tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi pada kelompok penduduk yang berpendapatan di atasnya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2018, distribusi pendapatan yang diproksi dengan pengeluaran per kapita menunjukkan penurunan kemudian peningkatan, namun tidak signifikan. Pada tahun 2018, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah hanya 26,55 persen dari total pendapatan penduduk. Angka ini tercatat sedikit lebih tinggi dari proporsi tahun 2017 yang mencapai 25,25 persen. Angka tersebut semuanya berada di atas angka 17 persen yang menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan kriteria Bank Dunia termasuk kategori “ketimpangan pendapatan rendah”. Hal itu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan khususnya 40 persen penduduk berpendapatan terendah cukup merata. Hasil penghitungan ketimpangan pendapatan dengan kriteria Bank Dunia di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Gambar 3.21.

Gambar 3.23 Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia, 2016-2018

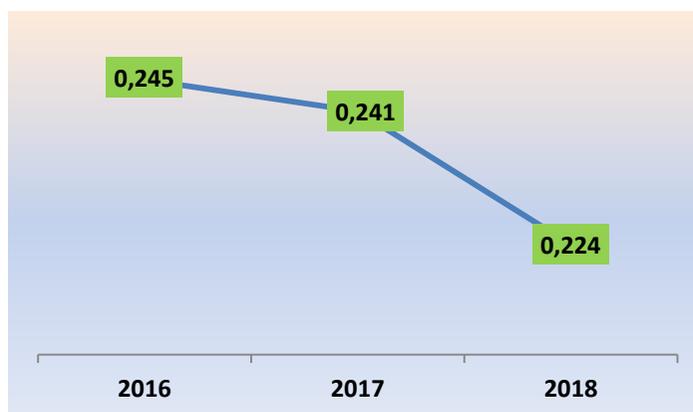


Sumber : BPS, diolah dari SUSENAS 2016-2018

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Nilai Indeks Gini yang diperoleh dengan menggunakan data pengeluaran cenderung “*under estimate*” karena pengeluaran konsumsi bagi penduduk kaya biasanya lebih rendah daripada pendapatannya (ada tabungan/ investasi, dll). Sebaliknya bagi penduduk miskin pengeluarannya bisa sama atau lebih besar dari pendapatannya, karena ada pinjaman, mengambil tabungan, menjual aset, atau menerima kiriman dari pihak lain. Akan tetapi karena memang data mengenai pendapatan cukup sulit untuk didapat maka data pengeluaran dapat dijadikan sebagai *proxy* pendapatannya.

Analisa yang biasa dilakukan terhadap Indeks Gini adalah dengan cara membandingkan angka Indeks Gini antardaerah atau antarwaktu, apakah Indeks Gini semakin kecil yang berarti distribusi pendapatan makin merata, atau sebaliknya. Banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa angka Indeks Gini dibawah 0,4 menunjukkan distribusi pendapatan yang cukup merata (ketimpangan pendapatan rendah), sedangkan angka Indeks Gini diatas 0,5 berarti tingkat ketimpangan pendapatan cukup serius (ketimpangan pendapatan tinggi).

Gambar 3.24 Ketimpangan Pendapatan menurut Indeks Gini, 2016-2018



Sumber : BPS, diolah dari SUSENAS 2016-2018

Hasil penghitungan berdasarkan data Susenas diperoleh hasil bahwa angka Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 sebesar 0,224 menurun 0,017 poin jika dibandingkan dengan tahun 2017, namun tidak signifikan. Nilai Indeks Gini yang masih dibawah 0,4 tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan termasuk kategori “ketimpangan rendah” atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan cukup merata.

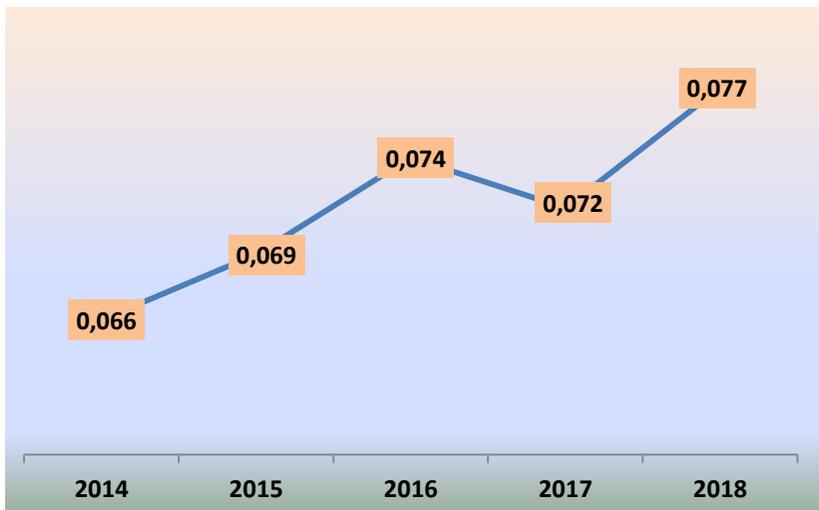
3.5.5 Perkembangan Indeks Williamson

Penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan lainnya yang juga penting untuk dikaji adalah penghitungan kesenjangan antar wilayah/ketimpangan regional. Teknik penghitungan ketimpangan regional ini yaitu dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah.

Pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran yang dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk di daerah-daerah yang berada pada ruang lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis, dalam hal ini adalah wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks sama dengan nol, yang menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan, sedangkan angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya (semakin mendekati angka satu) berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan. Indeks Williamson yang diperoleh akan terletak antara angka 0 (nol) sampai 1 (satu);

- Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara kecamatan merata.
- Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara kecamatan tidak merata.

Gambar 3.25 Perkembangan Indeks Williamson, 2014-2018



Sumber : BPS, diolah dari Studi Penyusunan PDRB Kecamatan, 2014-2018
 Catatan : Angka sangat sementara

Gambar 3.25 memperlihatkan bahwa berdasarkan indeks williamson, ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan sudah merata. Hal ini terlihat dari nilai indeks Williamson yang mendekati 0. Meskipun secara umum, berdasarkan gambar tersebut, nampak perkembangan indeks yang cenderung meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2014.

4

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kependudukan dapat diketahui bahwa angka beban ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 47,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk usia produktif harus menanggung penduduk yang tidak produktif hampir 48 jiwa. Dengan angka tersebut, Kabupaten Bangka Selatan telah masuk pada periode bonus demografi. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Selatan tahun demi tahun juga semakin melambat. Hal ini membuktikan bahwa program KB telah cukup berhasil.
2. Capaian pendidikan ditunjukkan dari angka melek huruf usia 15 tahun keatas dan angka partisipasi sekolah. Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 sudah mencapai 97,41 persen. Angka partisipasi sekolah 7-12 tahun di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 mencapai 99,25 persen, angka partisipasi sekolah 13-15 tahun mencapai 87,59 persen dan angka partisipasi sekolah 16-18 tahun mencapai 57,28 persen. Hal ini menunjukkan program wajib belajar sembilan tahun telah cukup baik dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan, hanya saja masih perlu dorongan dan dukungan untuk terus bersekolah terutama untuk siswa usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun.
3. Capaian kesehatan dapat ditunjukkan dari angka kesakitan (morbiditas). Pada tahun 2018 angka kesakitan Kabupaten Bangka Selatan mencapai 12,71 persen. Hal ini menunjukkan taraf kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan sudah cukup baik walaupun masih perlu untuk terus ditingkatkan.

4. Capaian ketenagakerjaan ditunjukkan dengan tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menduduki peringkat tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang. Tingkat pengangguran Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 mencapai angka 4,35 persen. Capaian ini relatif sudah cukup baik, walaupun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 meningkat cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 sudah mencapai angka 65,98 walaupun masih menempati posisi terakhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Bangka Selatan mencapai angka 1,48 persen yang merupakan laju pertumbuhan IPM tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan tersebut didorong oleh indikator angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang tumbuh masing-masing sebesar 3,92 persen, 1,70 persen dan 5,22 persen.
6. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 mencapai angka 3,7 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan menduduki peringkat kedua tingkat kemiskinan terendah. Persoalan kemiskinan ini tidak sekedar mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi menyangkut aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nilai Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masing-masing mencapai 0,49 dan 0,08. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin hampir mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluarannya pun tidak terlalu timpang.

7. Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2016-2018 masih dibawah angka 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk Bangka Selatan relatif sudah cukup merata dan masih dalam kategori ketimpangan rendah.
8. Hasil penghitungan ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia diperoleh hasil bahwa persentase total pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2016-2018 berada di atas angka 17 persen yang menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan kriteria Bank Dunia juga termasuk kategori “ketimpangan pendapatan rendah”. Hal itu juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan sudah cukup merata.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	304 485	311 085	317 735	324 305	330 793
Belitung	171 271	175 048	178 721	182 418	186 155
Bangka Barat	192 395	196 598	200 684	204 778	209 011
Bangka Tengah	177 218	180 903	184 720	188 603	192 429
Bangka Selatan	189 492	193 583	197 670	201 782	205 901
Belitung Timur	117 026	119 394	121 971	124 064	127 064
Pangkalpinang	191 994	196 202	200 326	204 392	208 520
Kep. Babel	1 343 881	1 372 813	1 401 827	1 430 865	1 459 873

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk, 2010-2025

Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	2,17	2,17	2,14	2,07	2,00
Belitung	2,19	2,21	2,10	2,07	2,05
Bangka Barat	2,19	2,18	2,08	2,04	2,07
Bangka Tengah	2,23	2,08	2,11	2,10	2,03
Bangka Selatan	2,14	2,16	2,11	2,08	2,04
Belitung Timur	2,23	2,02	2,16	2,14	1,99
Pangkalpinang	2,17	2,19	2,10	2,03	2,02
Kep. Babel	2,19	2,15	2,11	2,07	2,03

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk, 2010-2025

Lampiran 3. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	144 181	144 364	NA	156 011	155 733
Belitung	86 854	87 918	NA	94 541	98 408
Bangka Barat	89 823	91 923	NA	100 449	106 408
Bangka Tengah	78 532	85 602	NA	93 626	98 297
Bangka Selatan	84 969	96 511	NA	93 178	99 839
Belitung Timur	59 821	60 709	NA	63 717	69 033
Pangkalpinang	92 779	98 815	NA	97 495	100 200
Kep. Babel	636 959	665 842	705.173	699 017	727 918

Sumber : BPS, Sakernas, 2014-2018

*) Sakernas untuk estimasi Kabupaten/Kota pada tahun 2016 tidak dilaksanakan

Lampiran 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	8,36	8,87	NA	4,29	4,12
Belitung	3,03	4,57	NA	2,57	2,93
Bangka Barat	1,21	5,92	NA	4,23	3,11
Bangka Tengah	5,64	6,58	NA	3,38	3,93
Bangka Selatan	3,26	2,01	NA	2,74	4,35
Belitung Timur	2,61	2,55	NA	2,62	1,50
Pangkalpinang	8,84	10,64	NA	5,80	4,70
Kep. Babel	5,14	6,29	2,60	3,78	3,65

Sumber : BPS, Sakernas, 2014-2018

*) Sakernas untuk estimasi Kabupaten/Kota pada tahun 2016 tidak dilaksanakan

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	65,46	63,88	NA	65,75	64,10
Belitung	63,48	67,64	NA	69,29	70,36
Bangka Barat	67,12	65,47	NA	68,17	70,47
Bangka Tengah	62,48	66,48	NA	69,27	70,99
Bangka Selatan	67,08	70,32	NA	64,70	67,40
Belitung Timur	68,79	68,11	NA	68,00	71,93
Pangkalpinang	64,90	67,41	NA	63,42	63,64
Kep. Babel	65,45	66,71	68,93	66,72	67,79

Sumber : BPS, Sakernas, 2014-2018

*) Sakernas untuk estimasi Kabupaten/Kota pada tahun 2016 tidak dilaksanakan

Lampiran 6. Angka Melek Huruf 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	98,24	97,87	97,77	97,83	98,49
Belitung	98,68	98,86	97,35	98,69	98,29
Bangka Barat	95,15	96,36	96,51	97,78	96,94
Bangka Tengah	97,29	97,78	97,47	96,43	96,66
Bangka Selatan	95,71	95,44	96,84	97,54	97,41
Belitung Timur	98,92	98,77	98,28	97,93	98,03
Pangkalpinang	99,26	98,60	99,41	98,31	98,11
Kep. Babel	97,60	97,63	97,66	97,79	97,76

Sumber : BPS, Susenas, 2014-2018

Lampiran 7. Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Belitung	100,00	97,84	100,00	100,00	100,00
Bangka Barat	97,57	98,74	97,78	99,34	100,00
Bangka Tengah	98,77	99,49	100,00	100,00	99,73
Bangka Selatan	98,47	98,04	98,46	98,37	99,25
Belitung Timur	99,63	100,00	100,00	99,88	100,00
Pangkalpinang	99,64	100,00	98,50	100,00	99,99
Kep. Babel	99,16	99,22	99,25	99,64	99,85

Sumber : BPS, Susenas, 2014-2018

**Lampiran 8. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	94,97	95,20	93,83	95,33	95,35
Belitung	91,46	91,64	95,87	95,27	96,35
Bangka Barat	88,72	90,03	89,19	90,79	90,10
Bangka Tengah	87,84	91,52	92,27	91,29	90,84
Bangka Selatan	87,67	88,98	87,42	87,11	87,59
Belitung Timur	93,02	85,48	87,87	89,16	90,95
Pangkalpinang	96,03	96,12	94,81	96,09	95,43
Kep. Babel	91,53	91,82	92,03	92,41	92,70

Sumber : BPS, Susenas, 2014-2018

**Lampiran 9. Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	71,52	70,28	76,92	73,43	73,04
Belitung	62,14	65,06	53,09	61,26	68,90
Bangka Barat	59,76	63,94	67,16	65,60	59,52
Bangka Tengah	57,51	67,18	60,39	68,74	66,24
Bangka Selatan	66,45	46,01	58,73	56,28	57,28
Belitung Timur	55,94	69,78	58,92	64,60	66,12
Pangkalpinang	77,27	79,67	83,00	76,53	75,62
Kep. Babel	65,78	66,17	66,35	66,99	67,11

Sumber : BPS, Susenas, 2014-2018

Lampiran 10. Angka Kesakitan (Morbiditas) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	9,53	12,59	15,54	14,66	14,81
Belitung	9,26	10,46	12,15	9,03	10,46
Bangka Barat	14,81	13,39	12,72	9,74	11,69
Bangka Tengah	6,32	15,61	13,79	12,85	9,99
Bangka Selatan	12,31	13,29	12,82	8,86	12,71
Belitung Timur	6,94	12,01	11,34	12,31	7,79
Pangkalpinang	10,66	11,97	14,03	12,12	8,81
Kep. Babel	10,16	12,78	13,51	11,58	11,41

Sumber : BPS, Susenas, 2014-2018

Lampiran 11. Persentase Penolong Proses Kelahiran dengan Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	90,83	98,80	100,00	100,00	98,25
Belitung	91,41	96,66	96,95	100,00	100,00
Bangka Barat	84,36	95,15	97,13	100,00	97,89
Bangka Tengah	89,25	100,00	98,90	100,00	95,96
Bangka Selatan	78,48	94,96	96,15	100,00	91,43
Belitung Timur	96,74	96,22	100,00	100,00	96,18
Pangkalpinang	97,83	100,00	97,46	98,49	98,00
Kep. Babel	89,17	97,56	98,09	99,79	97,06

Sumber : BPS, Susenas, 2014-2018

Lampiran 12. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	69,79	70,03	70,43	71,09	71,80
Belitung	69,59	70,29	70,81	70,93	71,70
Bangka Barat	66,43	67,23	67,60	67,94	68,68
Bangka Tengah	68,09	68,66	68,76	68,99	69,52
Bangka Selatan	63,54	63,89	64,57	65,02	65,98
Belitung Timur	68,10	68,83	69,30	69,57	70,22
Pangkalpinang	76,28	76,61	76,73	76,86	77,43
Kep. Babel	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67

Sumber : BPS, IPM, 2014-2018

Lampiran 13. Angka Harapan Hidup (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,47	70,48	70,52	70,56	70,73
Belitung	70,22	70,32	70,38	70,44	70,64
Bangka Barat	69,46	69,47	69,52	69,56	69,73
Bangka Tengah	69,98	70,28	70,38	70,49	70,78
Bangka Selatan	66,56	66,86	66,99	67,13	67,47
Belitung Timur	71,03	71,23	71,30	71,37	71,59
Pangkalpinang	72,31	72,51	72,57	72,64	72,86
Kep. Babel	69,72	69,88	69,92	69,95	70,18

Sumber : BPS, IPM, 2014-2018

Lampiran 14. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	7,92	7,94	7,96	8,19	8,20
Belitung	8,07	8,09	8,10	8,11	8,15
Bangka Barat	6,57	6,68	6,89	7,06	7,18
Bangka Tengah	6,68	6,70	6,71	6,79	6,80
Bangka Selatan	5,87	5,88	5,96	6,12	6,36
Belitung Timur	7,89	7,91	7,95	8,00	8,14
Pangkalpinang	9,63	9,75	9,76	9,77	9,78
Kep. Babel	7,35	7,46	7,62	7,78	7,84

Sumber : BPS, IPM, 2014-2018

Lampiran 15. Harapan Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	12,33	12,36	12,37	12,58	12,68
Belitung	10,77	11,32	11,47	11,51	11,83
Bangka Barat	10,99	11,48	11,49	11,50	11,51
Bangka Tengah	11,40	11,72	11,73	11,74	11,75
Bangka Selatan	10,86	10,88	11,25	11,34	11,35
Belitung Timur	10,94	11,28	11,46	11,48	11,49
Pangkalpinang	12,74	12,76	12,77	12,78	12,83
Kep. Babel	11,18	11,60	11,71	11,83	11,87

Sumber : BPS, IPM, 2014-2018

Lampiran 16. Pengeluaran per Kapita (dalam Ribuan Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	10 679	10 904	11 279	11 420	12 043
Belitung	12 375	12 443	12 865	12 910	13 281
Bangka Barat	11 154	11 243	11 303	11 394	12 011
Bangka Tengah	12 170	12 210	12 248	12 330	12 836
Bangka Selatan	10 633	10 824	10 932	10 999	11 573
Belitung Timur	10 272	10 523	10 729	10 894	11 302
Pangkalpinang	14 619	14 707	14 807	14 923	15 560
Kep. Babel	11 691	11 781	11 960	12 066	12 666

Sumber : BPS, IPM, 2014-2018

Lampiran 17. Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	16,0	17,4	17,3	16,5	18,0
Belitung	12,7	14,6	13,9	14,1	14,0
Bangka Barat	6,1	6,0	5,5	6,1	6,4
Bangka Tengah	9,4	10,2	10,4	11,4	11,1
Bangka Selatan	7,4	7,2	7,1	7,9	7,6
Belitung Timur	7,9	8,7	8,5	8,4	8,9
Pangkalpinang	7,8	10,0	10,1	9,8	10,3
Kep. Babel	67,2	74,1	72,8	74,1	76,3

Sumber: BPS, Dikutip dari Buku Data dan Informasi Kemiskinan 2014-2018

Lampiran 18. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47
Belitung	7,36	8,38	7,85	7,77	7,56
Bangka Barat	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05
Bangka Tengah	5,27	5,67	5,64	6,07	5,81
Bangka Selatan	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70
Belitung Timur	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06
Pangkalpinang	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95
Kep. Babel	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25

Sumber: BPS, Dikutip dari Buku Data dan Informasi Kemiskinan 2014-2018

Lampiran 19. Garis Kemiskinan (dalam Rupiah per Kapita) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	375.653	385 899	427 684	475 024	497 164
Belitung	563.475	580 050	610 072	652 989	704 855
Bangka Barat	388.493	399 401	440 850	497 567	520 642
Bangka Tengah	512.240	528 720	586 445	653 308	680 907
Bangka Selatan	364.504	374 778	415 359	462 716	483 823
Belitung Timur	492.652	504 668	528 572	563 309	622 396
Pangkalpinang	509.246	527 668	604 011	654 044	700 949
Kep. Babel	469.814	488 701	534 229	587 530	631 467

Sumber: BPS, Dikutip dari Buku Data dan Informasi Kemiskinan 2014-2018

Lampiran 20. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	0,72	0,57	0,74	0,42	0,66
Belitung	0,84	1,10	0,79	1,14	0,59
Bangka Barat	0,28	0,32	0,34	0,16	0,34
Bangka Tengah	0,50	0,84	0,59	0,57	0,42
Bangka Selatan	0,38	0,44	0,45	0,19	0,49
Belitung Timur	1,05	0,80	0,98	0,79	1,01
Pangkalpinang	0,45	0,47	0,70	0,57	0,49
Kep. Babel	0,60	0,67	0,67	0,49	0,69

Sumber: BPS, Dikutip dari Buku Data dan Informasi Kemiskinan 2014-2018

Lampiran 21. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	0,19	0,10	0,16	0,06	0,17
Belitung	0,24	0,23	0,15	0,23	0,08
Bangka Barat	0,04	0,05	0,07	0,01	0,05
Bangka Tengah	0,09	0,20	0,10	0,10	0,06
Bangka Selatan	0,07	0,07	0,11	0,02	0,08
Belitung Timur	0,25	0,18	0,22	0,18	0,19
Pangkalpinang	0,08	0,07	0,16	0,11	0,11
Kep. Babel	0,12	0,14	0,15	0,08	0,14

Sumber: BPS, Dikutip dari Buku Data dan Informasi Kemiskinan 2014-2018

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA SELATAN**
Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Selatan
Telp/Fax: 0718-4220039
E-mail: bps1905@bps.go.id
Homepage: <http://bangkaselatankab.bps.go.id>